Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
DOI:10.25077/jakp | Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id |

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN LOKAL
Studi: Center for Disaster Risk Management- Community Develompent Study (CDRM_CDS) dan Cipta Fondasi Komunitas (CFK) di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rinawati [1]*, Nusyirwan Effendi [2]
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
[2] Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* rinawati@gmail.com

Dikirim : 08/02/2022
Diterima : 17/03/2022
Terbit : 21/04/2022

Abstract

Development is a must and important in an effort to create community welfare. In carrying out development, it is necessary to cooperate with the government as a development coordinator with parties outside the government who have sensitivity and a sense of social responsibility for development in the community. Community Social Institutions (NGOs) are institutions from the community that can be used as government partners in community development. This program is supported by increasing the capacity of institutions and the community itself through training and counseling. The role of NGOs in strengthening local government, the results obtained are at the structural stage. This means that we can only see the birth of a local government structure which in fact originates from the desire of the community that is formed in a participatory manner. However, to see the role of government that influences the development and welfare of the community, this is still not seen in a concrete way. This is in accordance with the concept of empowerment that empowerment is a process. Local government or empowerment cannot be done in a short time pheriod. Sustainability in this program is needed until the local government can truly be empowered or independent. To increase local government independence, not only carried out by NGOs, but all of relevant parties such as the Regional Government, the Community, and the local government it self, there must be efforts to increase empowerment

Keywords: The Role of NGOs; Strengthening Local Government, Mentawai

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Padang

Pariaman dengan landasan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor.49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mentawai merupakan daerah kepulauan yang terletak di pantai barat Sumatera. Secara administratif, Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan, 43 desa, dan 202 dusun.

Salah satu indikator dalam melihat pembangunan suatu daerah adalah dari melihat tingkat kesejahteraan yang ada di suatu daerah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki peringkat nomor 1 di Sumatera Barat.

Salah satu aspek yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pembangunan adalah melihat dari kesejahteraan dan tingkat ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dengan bagaiamana masyarakat dapat hidup layak dan bebas dari garis kemiskinan (UNDP). Berdasarkan data diatas, angka kemiskinan yang terlihat dari 64% masyarakat Mentawai hidup dalam kondisi pra sejahtera. Angka yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat yang hanya 13%. Berdasarkan kondisi tersebut, yang menjadi prioritas sekarang adalah bagaimana mengangkat angka 64% dari masyarakat pra sejahtera ini dapat dilakukan penanganan yang serius.

Faktor lain yang menghambat pembangunan adalah bencana alam. Bencana alam yang terjadi mengakibatkan kerugian secara moril dan materil. Hal ini juga terjadi di Mentawai. Pada tahun 2010, mentawai mengalami bencana gempa dan Stunami yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta melayang.

Bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Mentawai 25 Oktober 2010 menimbulkan kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 348,92 milyar. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif dengan perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 117,82 milyar (33,9%) dari total nilai kerusakan dan kerugian), dimana hampir 80% kerusakan dan kerugian terjadi pada sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan kehilangan pendapatan karena kerusakan pada lahan pertanian dan kegagalan panen serta kerusakan pada peralatan tangkap nelayan. Selanjutnya, kerusakan dan kerugian yang di alami sektor perumahan sebesar Rp. 115,82 milyar (33,2%). Kerusakan dan kerugian juga terjadi pada sektor infrastruktur, sektor sosial dan lintas sektor.

Tingginya angka keluarga pra sejahtera (kemiskinan), korban bencana alam menjadikan masyarakat Mentawai makin terpuruk. Untuk itu, perlu usaha untuk mengangkat persoalan Mentawai secara bijak. Dibutuhkan terobosan untuk menjadikan Mentawai sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan. Permasalahan yang terjadi di Mentawai harus dilihat dalam konteks lokal. Peran pemerintah sangat menentukan dan memegang andil yang besar

dalam penanganan masalah yang dialami masyarakatnya. Pemerintahan Lokal dalam unit terkecil pemerintahan formal di Indonesia diakui dalam bentuk Desa. Desa dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa dusun. Bentuk Pemerintahan inilah yang terdapat di Mentawai. Alasan melihat fenomena ini dengan konteks lokal, karena permasalahan yang terjadi di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Hal ini juga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Peran pemerintah Desa dan Dusun sangat strategis sebagai lembaga formal pemerintah yang menjadi promotor pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Untuk itu, diperlukan pemerintahan lokal yang kuat, yang berdaya yang mampu menjadi fasilator dalam pelaksanaan pembangunan untuk masyarakatnya.

Salah satu cara penguatan pemerintahan lokal dengan adanya dampingan dari pihak luar pemerintahan itu sendiri. Partisipasi semua pihak dalam peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam upaya mencapai cita-cita pembangunan yang berbasis masyarakat. LSM merupakan lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan mitra dalam menguatkan pemerintah itu sendiri. Peran LSM sebagai lembaga independen sangat strategis dalam menjadikan pemerintahan lokal yang bisa berdaya.

Pemerintah berperan sebagai katalisator pembangunan yang dapat mempercepat pembangunan tersebut. LSM dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam mendorong masyarakat maupun pemerintah dalam percepatan pembangunan. Pada saat ini, peran LSM dalam mengangkat kepentingan rakyat tidak lagi dipandang sebagai suara sumbang yang muncul dari kalangan pinggiran di luar sistem. Kehadiran LSM mulai diakui sebagai bagian dari masyarakat. Posisi LSM yang selalu ada ditengah masyarakat telah memberikan tempat tersendiri bagi menjamurnya tumbuh kembang LSM tersebut. Hal ini merupakan dampak yang muncul sebagai akibat gerakan reformasi yang antara lain ingin menempatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diharapkan terciptanya pembangunan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengambil peran dalam percepatan pembangunan, salah satu pilar pembangunan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah yang keadaan pembangunannya masih tertinggal dari daerah lain disekitarnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan ekonomi lokal
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penyediaan prasarana dan sarana lokal perdesaan

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam memberikan kontribusi sebagai agen pembangunan di tengah masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan daftar LSM yang ada di Mentawai, penulis ingin melihat peran LSM yang melakukan kegiatan di sektor Pemberdayaan Pemerintah lokal. Alasan pemilihan sektor ini karena penulis mengamati dan menyadari, peran pemerintahan di level paling bawah adalah sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, yang dimaksud pemerintahan level paling bawah adalah pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa memiliki akses langsung ke masyarakat dalam kesehariannya. Pemerintah Desa juga diwajibkan untuk membentuk lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Berdasarkan pentingnya peranan Pemerintahan Desa, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berdaya, memiliki kekuatan dalam mengorganisir masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Peran LSM membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan Pemerintahan Desa itu sendiri menjadi hal sangat menarik bagi penulis untuk dikaji dalam penelitian ini. Di Mentawai, terdapat LSM yang melakukan program pemberdayaan dan penguatan pemerintahan lokal yaitu Center For Disaster Risk Manajement and Community Development Studies (CDRM-CDS) dan Cipta Fondasi Komunitas (CFK). CDRM-CDS dalam melakukan kegiatan penguatan pemerintahan pada level desa yaitu dengan melalui penguatan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang taruna, Kelompok Siaga bencana, PKK, dll. Sedangkan CFK melakukan kegiatan pada level dusun yaitu dengan memperkuat posisi dusun dalam membuat perencananaan pembangunan, meliputi kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi masyarakat, dan Pemerintah Dusun.

Kondisi ini menarik untuk dilihat bagaimana peran yang dilakukan LSM dalam memberikan dampak untuk penguatan pemerintah lokal. Lokasi diKepulauan Mentawai dirasa sangat menarik dilatarbelakangi oleh wilayah ini merupakan wilayah yang terdampak bencana Stunami 2010, secara posisi merupakan daerah terluar Indonesia di bagian wilayah barat yang berhadapan langsung dengan samudra pasifik, Mentawai juga merupakan salah satu kabupaten pemekaran Pasca Otonomi Daerah, serta saat ini juga masih menjadi wilayah tertinggal dengan masih masuk dalam daftar wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Pendekatan pembangunan seyogyanya memposisikan kemandirian sebagai kata kuncinya. Dalam hal ini, kemandirian berupa kompetensi dan otonomi setiap entitas pembangunan dalam membangun dirinya sendiri. Maksudnya adalah pembangunan dilaksanakan dengan

memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki yaitu terjaganya keadilan berpartisipasi bagi semua elemen yang ada dalam masyarakat. Pembangunan yang sesunguhnya adalah pembangunan yang berbasiskan kepada masyarakat (*Community Based Development*) yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dari pelaku pembangunan itu sendiri.

Dalam Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Ketentuan Umum Pasal I ayat (9) menyebutkan defenisi pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Dari beberapa defenisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini dari pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang berpusat kepada rakyat yang mana rakyat berperan sebagai pelaku pembangunan tersebut. Pembangunan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Asumsi otonomi daerah pengharapan atas perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan cara memprioritaskan pada pertumbuhan yang ada dalam masyarakat. Pertumbuhan di tingkat lokal harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang berada di kelompok marjinal seperti perempuan, kelompok cacat, serta masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tertinggal, yang masih sangat terbatas dalam mendapatkan akses pembangunan. Dengan ini, pemerintah perlu mendapat dukungan dari ornop/lebaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja dalam pembangunan.

Penguatan pemerintahan merupakan suatu keharusan untuk menciptakan desa yang berdaya. Sumantri membedakan dalam penguatan pemerintahan lokal, bisa dilihat dari kultural dan struktural. Aspek kultural menurut Bambang Trisanto (2010) meliputi:

1. Perubahan cara fikir .
2. Perubahan cara bersikap.
3. Perubahan cara bertingkah laku.

Aspek penguatan desa secara struktural menjadi sesuatu yang manarik untuk di telaah. Peran pemerintahan lokal dalam memperkuat struktur tatanan social, oleh Sasu Wasistiano (2007) memberikan indicator Indikator dalam melihat meliputi:

Misi meningkatkan tata kepemimpinan

1. Misi Peningkatan tata Pemerintahan
2. Misi Peningkatan kapasitas tata kemasyarakatan
3. Misi peningkatan kapasitas tata ruang

Penelitian ini mencoba mengelaborasi bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh LSM

dalam membantu memperkuat peran pemerintah lokal di Daerah dampingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap dua Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki program di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, Yaitu CDRM-CDS dan Cipta Fondasi Komunitas (CFK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta menggunakan data sekunder. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2005). Jadi tipe penelitian ini adakah bersifat deskriptif. Data-data yang didapatkan dalam penelitan ini ditampilkan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, matrik, gambar dan dianalisa berdasarkan konsep yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian ini cocok u ntuk mendeskripsikan Peran CDRM-CDS dan CFK dalam penguatan pemerintahan lokal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan (data primer) dan data yang diperoleh dari dokumen (data sekunder) yang berasal dari masyarakat, pihak LSM, Pemerintahan Desa dan Dusun, Pemerintahan Kecamatan yang memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian Peran LSM dalam Pemberdayaan pemerintahan lokal di Mentawai.

Data yang di kumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis, ditampilkan, dan disimpulkan. Kesimpulan menurut kemampuan interprestasi peneliti di dukung oleh data primer dan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Pemerintahan lokal merupakan merupakan pemerintahan yang berada di daerah setempat yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan untuk melayani masyarakatnya. Dalam konteks ini, pemerintahan lokal yang dimaksud adalah pemerintahan formal terendah ditingkat lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Fokusnya adalah pemerintahan lokal yang mendapat dampingan dari LSM CDRM-CDS dan CFK dalam Penguatan pemerintahan lokal. Desa tersebut meliputi Desa Sikakap, Desa Taikako, Desa Betumonga.

Pemerintahan lokal yang terendah di Mentawai berbentuk Desa. Desa terdiri dari beberapa dusun. Secara geografis, Pemerintahan desa di Mentawai memiliki wilayah yang sangat luas.

Hal ini disebabkan penyebaran penduduk yang yang sangat jarang disertai dengan luasnya wilayah yang ada. Kondisi ini tidak sejalan dengan sarana penghubung dan alat transportasi di dalam dan antar Desa. Untuk mencapai dusun satu dengan dusun yang lain, akses yang tersedia adalah jalur laut dengan menggunakan perahu dayung ataupun dengan jalan kaki. Luasnya wilayah desa, menjadikan pemerintahan desa mengalami kendala dalam melayani masyarakat. Pemerintah Desa susah untuk berhubungan dengan kepala dusun yang notabebe sebagai perpanjangan tangan Desa, dan dapat dipastikan pemerintahan desa susah untuk bersentuhan langsung dengan masyarakatnya.

Kendala geografis, luasnya wilayah administratif, serta keterbatasan akses yang dimiliki oleh desa, berakibat tidak optimalnya pelayanan pemerintah. Koordinasi dan penyampaian informasi antara pelaku pemerintahan di Desa dirasakan sangat mengalami kendala. Jaringan telekomunikasi pun tidak menjangkau masyarakat di Desa. Alat komunikasi yang digunakan desa ke dusun dan masyarakat adalah dengan pesan berantai.

Pelaksanaan pemerintahan lokal di Mentawai masih sangat jauh dari harapan, Banyak Faktor yang mempengaruhi. Kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana, dan juga Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas.

Hal ini berbanding terbalik dengan besarnya tanggungjawab dan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Dalam undang-undang No.72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, Pasal 8 menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal & huruf (b) adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat adalah kata kunci dari tugas pemerintahan daerah yang diambil alih oleh desa. Harapan yang besar dan sesuai dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dekat dengan masyarakatnya langsung. Tetapi, berdasarkan kondisi yang terjadi, pemerintahan desa juga masih belum sepenuhnya dekat dengan masyarakat. Desa di Mentawai masih kesulitan dalam menjangkau masyarakatnya. Keterbatasan yang ada tentu mempengaruhi pengaruh pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa. Kesulitan inilah yang dialami pemerintahan desa. Pemerintah kesulitan dalam menjangkau masyarakatnya karena secara geografis, Desa memiliki lokasi yang sangat luas, sedangkan dengan sarana dan prasarana yang ada, aparat desa tidak bisa menjangkau masyarakat.

Pentingnya pemberdayaan untuk menggapai sebuah cita-cita dan harapan menciptakan masyarakat desa yang berdaya, memiliki kekuatan, dan mandiri merupakan tanggupjawab

pemerintah. Apabila pemerintah belum bisa optimal dalam melakukan itu, tentu memerlukan stimulus atau pihak dari luar pemerintah itu sendiri untuk bekerjasama memajukan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis untuk bersama pemerintahan di level desa melakukan penguatan kepada masyarakat.

Desa memiliki perangkat desa dan juga dusun untuk membantu melaksanakan pelaksanaan pemerintahan. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga masyarakat di Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Besar dan pentingnya pemerintahan desa dalam struktur pemerintahan dan juga bagi masyarakat, diperlukan pemerintahan desa yang kuat, dalam arti memiliki kapasitas, berdaya dan mampu mengakomodasi partisipasi yang ada di masyarakat. Untuk melihat kekuatan pemerintahan desa, Menurut Sadu Wasistiono, dapat dilihat dari aspek struktural pemerintah. Hal ini terlihat dari tata pemerintahan, kapasitas organisasi pemerintahan, tata kemasyarakatan, dan kapasitas lingkungan dan infrastruktur desa.

Refleksi Penguatan Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Masyarakat lokal.

Penguatan pemerintahan lokal sejatinya untuk menciptakan sebuah pemerintah yang berdaya dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Peran pemerintah adalah 1). Sebagai fasilitator pembangunan, 2). Melayani masyarakat, 3).Memberdayakan masyarakat, dan 4).Mewujudkan visi. Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa pembangunan merupakan sebuah usaha yang secara bersama dan berkelanjutan harus dapat dilaksanakan. Pembangunan bukan hanya mendirikan sebuah sarana dan prasarana yang bisa dilihat secara kasat mata, tetapi lebih dari itu, pembangunan merupakan sebuah usaha yang terencana dan berkelanjutan dalam menjalankan peran yang diamanatkan Undang-undang.

Penguatan masyarakat desa dapat dilihat dari aspek:1) tata kepemimpinan, 2) tata pemerintahan, 3) tata kemasyarakatan, 4) aspek tata ruang dan lingkungan. Aspek ini harus dilaksanakan secara simultan dan menyeluruh, tidak bisa dilakukan secara parsial. Untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat berdasarkan indikator diatas, diperlukan sebuah upaya

dari dalam pemerintahan itu sendiri sebagai modal awal dalam melakukan perubahan, dan dukungan dari pihak luar sebagai fasilitator atau pihak yang dapat membantu atau mendorong penguatan pemerintahan lokal tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu pihak strategis berperan sebagai fasilitator penguatan pemerintahan lokal. Peran inilah yang dilakukan oleh CDRM-CDS dan CFK dalam upaya penguatan pemerintahan lokal di Mentawai.

Dalam melakukan penguatan pemerintahan pemerintahan desa, CDRM-CDS dan CFK telah melaksanakan program untuk memberdayakan masyarakat pada level struktur pemerintahan terendah yaitu Desa dan Dusun. Kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masarakat secara langsung untuk aktif dan terlibat dalam proses memajukan dan memberikan kapasitas kepada masyarakat itu sendiri, bertujuan untuk membangun masyarakat yang bertumpu kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini terliht dari upaya yang dilakukan dalam program-program, yang mana kegiatan tersebut terlaksana berdasarkan kepada keinginan dan kapasitas yang ada di tengah masyarakat itu sendiri.

Tata Kepemimpinan di level masyarakat lokal merupakan sebuah peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemimpin di tingkat lokal berarti pemimpin yang memiliki tugas berat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, kapasitas seorang pemimpin sangat dituntut untuk bisa melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang komando masyarakat. Pendampingan dalam tata kepemimpinan di tingkat lokal di Mentawai sangat diperlukan. Hal ini terlihat masih rendahnya kemampuan dan pemahaman tentang kepemimpinan masyarakat yang dimiliki oleh pemimpin lokal mentawai. Hal ini juga disebabkan karena besarnya tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintahan lokal, tetapi tidak dibarengi dengan pembinaan dan dampingan dari pemerintahan di atasnya, seperti pemerintahan kecamatan, dan Pemerintahan Kabupaten.

Pelaksanaan Tata pemerintahan di lokal mencerminkan demokrasi yang ada di tingkat desa. Demokrasi yang dimaksud adalah dengan adanya kerjasama antar lembaga eksekutif yaitu pemerintah desa dan legislatif yaitu Badan Permusyawaratan dalam menjalankan roda pemerintahan, yang mana lembaga tersebut merupakan pilihan dari masyarakat di Desa. Indikator dari tata pemerintahan tersebut dapat berjalan baik apabila lembaga pemerintahan tersebut dapat melayani masyarakat dengan baik pula. Aspek inilah yang didorong oleh CDRM-CDS dan CFK dalam menguatkan tata pemerintahan di tingkat lokal dengan mendampingi dan memberdayakan lembaga pemerintahan ini untuk bisa memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Peningkatan tata kemasyarakatan merupakan tugas penting dalam penguatan pemerintahan lokal, karena sesungguhnya, pemerintah yang kuat adalah jika memiliki masyarakat yang berdaya, mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara swadaya. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Mentawai yang mana masyarakatnya masih perlu dampingan untuk mencapai masyarakat yang berdaya. Hal ini disebabkan oleh kondisi di Mentawai yang merupakan salah satu daerah tertinggal dan menjadi daerah priorotas percepatan pembangunan daerah. Indikasinya terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka keluarga pra sejahtera, serta aspek kesehatan yang masih perlu perbaikan. Penguatan tata kemasyarakatan telah dilakukan oleh CDRM-CDS dan CFK.

Aspek tata ruang dan lingkungan merupakan aspek pelengkap dari penguatan pemerintahan lokal. Tata pemimpin yang baik, tata pemerintahan yang sudah berjalan efektif, tata masyarakat yang sudah berdaya, jika tidak didukung oleh tata ruang dan lingkungan yang baik juga belum bisa dikatakan pemerintah yang kuat. Hal ini tata ruang dan lingkungan merupakan tempat masyarakat akan tinggal dan melangsungkan kehidupan mereka.

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan masyarakat Desa merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan antara pembangunan tata pemimpin, tata pemerintahan, tata masyarakat, dan tata ruang dan lingkungan karena empat sektor ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jika ke empat sektor ini sudah berjalan baik, maka pembangunan masyarakat desa dapat berjalan dengan sendirinya. Hal ini adalah modal awal dalam melaksanakan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Refleksi Penguatan Pemerintahan Desa terhadap Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perubahan sistem baru dalam tata pemerintahan lokal di Daerah. Perubahan signifikan dalam otonomi daerah yaitu terdapat kewenangan dan keleluasan bagi daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri dalam bingkau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Babak baru system pemerintahan daerah mengakibatkan perubahan mendasar dalam pelaksanaannya. Secara administratif otonomi daerah bermakna yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara politis, otonomi daerah memberikan hak secara luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.

Desa memiliki peran penting dalam Otonomi Daerah di Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan daerah, karena Desa merupakan unit pemerintahan terendah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa diberikan keleluasaan dalam mengatur dan

mengurus masyarakatnya sendiri. Hal ini memberikan makna bahwa desa memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan serta membuat produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Disisi lain disebutkan bahwa eksistensi desa diakui berdasarkan hak asal usulnya. Dalam hal ini ada jaminan dari Negara untuk menjaga budaya dan identitas yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Kebijakan politis desa tertinggi adalah ketika desa mampu menjalankan peranannya sebagai pembuat keputusan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Hal tersebut tercermin dari kemampuan struktur lembaga yang ada didesa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melahirkan peraturan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, menciptakan rancangan pembangunan yang berakar kepada kebutuhan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perumusannya, serta pemilihan dan pembentukan struktur desa yang dipilih secara demokratis.

Pemerintahan Desa berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tujuan akhirnya adalah meciptakan masyarakat desa yang sejahtera. Salah satu untuk mencapainya kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan. Pembangunan di desa, adalah pembangunan yang dilakukan oleh segenap unsur yang ada di desa, supaya masyarakat memiliki andil dan berpartisipasi. Dengan ini, pembangunan menjadi bagian dari masyarakat desa tersebut. Masyarakat adalah pelaku dari pembangunan tersebut.

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan Otonomi Daerah. Desa berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu peran penting dalam pemerintahan desa adalah adanya peran pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa (Bambang Trisanto). Pembinaan terhadap pemerintahan desa itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Camat.

Dalam implementasinya di desa, pembinaan dan sangat jarang di lakukan. Pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan pembinaan tidak bekerja secara maksimal di desa. Seperti yang diungkapkan oleh Rindung Paingot dan Maralus, tidak ada pembinaan yang dilakukan secara inisiatif langsung dari kecamatan ke desa. Tetapi pembinaan ada jika ada permintaan dari desa dan mengundang pemerintahan kecamatan.

Pembinaan Desa dan kerjasama dengan aparat Desa merupakan suatu keharusan untuk dilakukan karena untuk mengurus sebuah Desa tidaklah dilakukan seorang diri. Diperlukan kerjasama dengan tim pemerintahan di level desa. Kepala Dusun merupakan staff pemerintahan Desa yang menjadi kaki tangan Kepala Desa, bagian administrasi di level

dusun. Kerjasama antar pemerintah desa dan pemerintah dusun di Desa Taikako mengalami hambatan komunikasi karena luasnya wilayah desa, sedangkan saran transportasi tidak memadai untuk menghubungkan dan menjangkau wilayah-wilayah di dusun-dusun.

Untuk mendapatkan desa yang bisa memberi andil terhadap kesuksesan otonomi daerah, diperlukan upaya penguatan pemerintahan desa. Untuk itu, perlu adanya sebuah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pemerintah desa. Peran yang dimainkan oleh LSM CDRM-CDS dan CFK dalam penguatan pemerintahan lokal di Mentawai adalah sebuah usaha membantu dan mendorong pemerintah daerah dalam menjadikan Desa sebagai pilar kesuksesan otonomi daerah dapat berdaya dan memberikan andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari kondisi geografis daerah di Indonesia yang berpulau-pulau dan masih belum ditopang dengan sarana transportasi dan memadai, mengakibatkan perlu usaha ekstra dari pemerintah dalam menggerakkan pembangunan. Keterbatasan pemerintah dalam menjangkau masyarakatnya mengakibatnya banyaknya masyarakat yang termarjinalkan dan jauh dari manfaat pembangunan. Untuk itu diperlukan kerjasama tingkat tinggi dan memberikan peluang kepada pihak diluar pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. LSM merupakan lembaga yang bisa dimanfaatkan sebagai mitra pemerintah, dan LSM bukanlah sebagai pesaing pemerintah.

Pemerintahan lokal yang kuat mutlak diperlukan, karena tumpuan pembangunan dan pelaksanaan pemerintah itu berada di tingkat desa. Desa merupakan pemerintahan yamg memiliki masyarakat, memiliki wilayah, dan juga harus memiliki pembangunan sehingga masyarakatnya bisa hidup dengan sejahtera.

Tugas berat pemerintahan lokal dalam sistem pemerintahan Indonesia harus dibarengi dengan kualitas dan kemampuan Pemerintahan itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Untuk itu diperlukan Pemerintahan Lokal yang berdaya.

Dalam memberdayakan pemerintahan lokal, semua pihak harus terlibat. Pihak yang berperan adalah pemerintah di level atas sebagai Pembina desa, Masyarakat sebagai pemilik desa, dan LSM sebagai pihak yang notabene sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, diperlukan kerjasana antar sektor untuk menciptakan pemerintahan lokal yang berdaya.

Pemerintahan lokal di Mentawai masih sangat perlu penguatan. Hal ini disebabkan oleh Mentawai merupakan daerah baru mengalami pemekaran, maka secara struktural, pemerintahan masih mencari formatnya. Faktor lain juga disebabkan makin cepatnya perkembangan desa-desa lain di luar Kabupaten Mentawai, jika tidak segera dilakukan percepatan penguatan, ditakutkan akan semakin tertinggal.

Penutup

Pembangunan merupakan suatu keharusan dan penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam otonomi daerah mendapat perhatian khusus untuk daerah sebagai penanggungjawab memajukan daerah. Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan dalam otonomi daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan, diperlukan kerjasama antara pemerintah sebagai koordinator pembangunan dengan pihak diluar pemerintah yang memiliki kepekaan dan rasa tanggungjawab sosial terhadap pembangunan di masyarakat. Salah satunya pihak yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dalam masyarakat adalah LSM. LSM merupakan lembaga yang lahir dari masyarakat dapat dijadikan mitra pemerintah dalam pengembangan masyarakat. CDRM-CDS dan CFK merupakan LSM yang melaksanakan kegiatan dalam penguatan pemerintahan lokal di Mentawai.

CDRM-CDS melakukan model pendekatan akar rumput kepada masyarakat (empowernment at the grassroot) dalam pemberdayaan mereka yang mana melakukan kegiatan advokasi kepada masyarakat dengan pendekatan bahwa hak untuk maju berkembang adalah hak universal yang dimiliki masyarakat, dan pemerintah wajib mengakomodasi dan memberikan hak tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada di desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani. Dengan peningkatan Kapasitas masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan dapat hidup dengan layak, karena pada dasarnya itu adalah hak masyarakat.

CFK dalam melaksanakan programnya memiliki pendekatan pendekatan tingkat tinggi; pembangunan akar rumput (hight level Partnership,: grassroot development). Pemberdayaan yang dilakukan berupa partisipasi tingkat tinggi dalam masyarakat. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif dengan melakukan penggalian potensi yang ada dimasyarakat tersebut. Penggalian aspirasi masyarakat dan pembentukan program pembangunan yang berasal dari masyarkat dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sendiri adalah pola yang dikembangkan dalam untuk menciptakan masyarakat yang kuat di level bawah (lokal).

CDRM-CDS dan CFK telah melaksanakan peran mereka dalam penguatan pemerintahan lokal melalui pemberdayaan yang mereka lakukan pada pemerintahan desa dan dusun. Aspek yang mereka lakukan dalam pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan bidang:1.

Peningkatan Kapasitas pemimpin Pemerintahan, Peningkatan Kapastitas bidang tata Pemerintahan, Tata Sosial Masyarakat, dan Tata Ruang.

Dibidang tata kepemimpinan, LSM CDRM-CDS dan CFK mendorong pemerintahan desa dengan melakukan pendampingan untuk melakukan perencanaan pembangunan di Desa Dan Dusun. Hal ini merupakan indikasi dari penguatan tata kepemimpinan, karena rancangan pembangunan merupakan implementasi dari visi dan misi pimpinan Desa dan Dusun.

Bidang tata pemerintahan, CDRM telah melakukan restrukturisasi pemerintahan lembaga-lembaga yang ada di Desa, sebagai bentuk penguatan di bidang tata pemerintahan. CFK di tingkat dusun mendorong lahirnya komite dusun sebagai lembaga yang berasal dari masyarakat yang diharapakan menjadi mitra kepala dusun dalam melaksanakan pembangunan di tingkat masyarakat.

Penguatan pemerintahan lokal bidang tata pemerintahan dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi berupa pelatihan untuk peningkatan produksi tanaman coklat dan nilam, bidang pendidikan dengan pelatihan kepada ibu-ibu kader pendidikan, penyuluhan kesehatan dan lingkungan. Hal ini sebagai upaya menjadikan masyarakat memiliki kapasitas dan berdaya, sehingga mampu menggerakkan pembangunan menjadi lebih baik lagi.

Penguatan pemerintahan di bidang Tata ruang dan lingkungan di lakukan dengan pemberdayaan masyarakat dengan perlunya hidup sehat dan bersih, serta daya dukung lingkungan untuk keberlangungan hidup yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan tentang kebersihan diri, lingkungan, pertanian organik ramah lingkungan, dll.

Peran yang dilakukan CDRM-CDS dan CFK dalam upaya penguatan pemerintah lokal, telah dilakukan dan mampu mendorong penguatan pemerintahan di tingkat desa dan dusun. Memasuki tahun ke 2 program yang dilakukan oleh CDRM-CDS dan CFK, perkembangan penguatan pemerintahan lokal baru pada tahap pembentukan strukturisasi lembaga. Masih diperlukan proses penguatan yang bekelanjutan, karena bentuk akhir dari penguatan pemerintahan lokal bukanlah pada bentuk struktur pemerintahan, tetapi sejauhmana pengaruh lembaga-lembaga yang ada memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, tujuan dari pemerintahan adalah menciptakan masyarakat lokal yang adil dan sejahtera.

.

Daftar Pustaka

A. Mappandjantji Amien, 2005 Kemandiarian Lokal, Persepsi Pembangunan Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektive Sains Baru. Gramedia, Jakarta.

Afrizal, 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari pengertian samapi penulisan laporan, (Padang: Laboratorium Sosiologi, FISIP. Universitas Andalas.

Ageng Nata Praja, Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Cociety di Kabupaten Grobogan. Tesis, Pada program Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Bambang Trisanto Soemantri, 2010, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia. Bandung.

Edy Suharto, 2015, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.

Ginandjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES.

Herry Darwanto, Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil Direktur pengembangan kawasan khusus dan tertinggal, Bapenas. (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8514)

Ichsan Malik. 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat. Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan. Jakarta. Kompas

John Clark, melalui bukunya yang berjudul Democratizing Development: The Role of Voluntury Organitation. Sebagaimana yang dikutip oleh Loekman Soetrisno, dalam kata pengantar NGO dan Pembangunan Demokrasi

Leo Agustino, Politik dan Otonomi Daerah. Untirta Press, 2005.

Lisa Jordan dan Peter Van Tuijl, 2006 Akuntabilitas LSM. LP3ES.Jakarta.

Mas'ud Said, 2005, Arah baru Otonomi Daerah di Indonesia. UMM Press. Malang

Moeljarto Tjokowinoto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mudrajat Kuncoro, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga. Jakarta

Nani Soedarsono, 2000, Pembangunan Berbasis Rakyat, Melati Bhakti Pertiwi, Jakarta.

Sadu Wasistiono, 2007, Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia. Bandung

Sunyoto Usman. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Wahyudin Sumpono, 2004 Perencanaan Desa Terpadu, Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat. CRS,